

ANALISIS EKONOMI POLITIK TARIF SMOOT-HAWLEY: DAMPAKNYA PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN BILATERAL

Eliya Sari

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Email: elieliasari18@gmail.com

Diterima: 6 Agustus 2023 Disetujui: 15 Desember 2023 Dipublikasikan: 29 Desember 2023

Abstract

US trade policy. developing over time. After World War II, the United States pushed through failed trade deals. The US promoted a free trade system by creating the International Trade Organization (ITO), but the US Congress refused to ratify the ITO because it was too liberal. Finally, the President of the United States approved the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as a temporary international trade agreement. GATT Seven has succeeded in becoming a forum for negotiating various international economic agreements and disputes. By promoting various initiatives in the Uruguay region, such as trade in services, intellectual property rights, and a strong dispute resolution mechanism, the United States, with the support of many countries, succeeded in establishing the WTO. However, since the early 2000s, the United States has continued to enter into investment agreements with its trading partners. The US government's trade policies will continue to be re-evaluated as participants, strategies and the environment change. This subsection examines changes in US international economic policy from the perspective of Braggi and Hill's approach to strategic relationships. Studies show that domestic economic services companies CSI and IPC and pharmaceuticals have a significant impact on changes in US economic policy.

Keywords: *Trade Regulation, Trade Law, United States Of America, Multilateralism*

Abstrak

Kebijakan perdagangan AS. berkembang dari waktu ke waktu. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mendorong kesepakatan perdagangan yang gagal. AS mempromosikan sistem perdagangan bebas dengan menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional (ITO), tetapi Kongres AS menolak untuk meratifikasi ITO karena terlalu liberal. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat menyetujui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai perjanjian perdagangan internasional sementara. GATT Seven telah berhasil menjadi forum negosiasi berbagai perjanjian dan perselisihan ekonomi internasional. Dengan mempromosikan berbagai prakarsa di kawasan Uruguay, seperti perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat, Amerika Serikat, dengan dukungan banyak negara, berhasil mendirikan WTO.¹

¹ I Soeparma, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization* (Jawa Timur:

Namun, sejak awal tahun 2000, Amerika Serikat terus mengadakan perjanjian investasi dengan mitra dagangnya. Kebijakan perdagangan pemerintah AS akan terus dievaluasi kembali seiring perubahan peserta, strategi, dan lingkungan. Subbagian ini mengkaji perubahan dalam kebijakan ekonomi internasional AS dari perspektif pendekatan Braggi dan Hill terhadap hubungan strategis. Studi menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekonomi domestik CSI dan IPC dan farmasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan kebijakan ekonomi AS.

Kata-kata kunci: Regulasi perdagangan, Hukum dagang, Amerika Serikat, Multilateralisme

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden Trump baru-baru ini untuk menggunakan tarif sebagai "senjata" untuk memaksa negara lain mengubah kebijakan perdagangan telah menciptakan kebutuhan untuk memahami apa itu perang perdagangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap arus barang dan jasa lintas batas. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian kami, perang dagang saat ini jauh dari yang pertama diprakarsai oleh Amerika Serikat. Amandemen Smoot-Hawley mengakibatkan pembalasan langsung dari eksportir utama Amerika.² Negara-negara telah menanggapi peran tersebut dengan mengenakan tarif pada ekspor AS. Meskipun proteksionisme meningkat pada tahun 1930-an, kami mengumpulkan data baru dan mengembangkan pengujian yang menunjukkan bahwa alternatif Smoot-Hawley berbeda: melibatkan kebijakan yang ditujukan untuk Amerika Serikat, negara pendiri pertama. Menggunakan kumpulan data baru arus perdagangan triwulanan, ditambah rincian tentang siapa yang mengajukan argumen hukum formal pada Undang-Undang Tarif 1930 dan siapa (selanjutnya) menggugat, model gravitasi memperkirakan ekspor AS. mereka sangat terpengaruh oleh perang dagang Smoot-Hawley.

Bahkan setelah dampak krisis keuangan, permintaan global yang lebih rendah, dan impor bruto yang lebih rendah oleh pihak lawan dari semua sumber, ekspor AS tetap relatif stabil.³ mengalami penurunan secara signifikan. Jika mereka hanya turun dengan penurunan total penjualan masing-masing negara, kami tidak akan menemukan hasilnya: mereka akan turun lagi 15% menjadi 32%, tergantung pada definisi dan negara yang disertakan. Menganalisis perilaku dan pemulihan pengunjung rasa membantu menilai

Airlangga University Press, 2020).

² Kris James Mitchener, Kevin Hjortshøj O'Rourke, and Kirsten Wandschneider, "THE SMOOT-HAWLEY TRADE WAR *," *The Economic Journal* 132, no. February (2022): 2500–2533.

³ Ismail Kamal and Muhammad Fuad, "Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).

pembalasan Smoot-Hawley dengan lebih baik: tidak hanya terhadap negara bagian yang sering dianggap "pendendam". Estimasi regresi tingkat output menegaskan bahwa substitusi masuk akal dalam menanggapi Smoot-Hawley (seperti dalam perang perdagangan baru-baru ini) dengan memilih jumlah ekspor AS yang berbeda. Tampaknya bahwa peningkatan ekspor AS. itu sebagian besar didorong oleh investor AS.⁴ Temuan kami menunjukkan bahwa pembatasan MFN tidak mencegah negara untuk bereaksi. Selain tarif yang ditargetkan secara strategis, pembalasan mencakup tindakan non-tarif seperti tarif, boikot, dan peningkatan penolakan untuk menjual produk Amerika. Hasil kami menunjukkan bahwa alternatif ini efektif dalam mengurangi ekspor AS. Pada bulan Maret 2018, Peter Navarro meramalkan bahwa tidak ada negara yang akan membayar bea cukai ke Amerika Serikat (Khoirunnisa and Sari 2020). Bukti dari tahun 1930-an menunjukkan bahwa bahkan negara yang kaya dan berkuasa seperti Amerika Serikat salah jika mengira dapat terlibat dalam perang dagang secara netral.

Negara merupakan faktor terpenting dalam hukum perdagangan internasional. Ternyata, dunia adalah yang paling adil. Pertama, dia adalah satu-satunya penguasa yang sah. Contoh perjanjian tersebut termasuk kerjasama, perjanjian perdagangan dan ekspor, perjanjian investasi bilateral, pembebasan pajak berganda, dll. diserahkan atau dijual kepada badan hukum yang membutuhkan⁵. Organisasi ini didirikan pada tahun 1966 berdasarkan Resolusi PBB 2255 (XXI) pada tanggal 12 Desember 1966. Dengan penciptaan Organisasi Perdagangan Dunia, batas-batas yurisdiksi didirikan. Banyak bidang, mulai dari perdagangan dan jasa hingga investasi dan hak kekayaan intelektual, diatur oleh aturan (perjanjian) WTO⁶. Organisasi publik internasional diciptakan oleh organisasi swasta (bisnis) atau organisasi profesional. Peran penting organisasi non-pemerintah dalam membentuk hukum perdagangan internasional tidak dapat dilebih-lebihkan. Misalnya, ICC (International Chamber of Commerce) telah mampu mengadopsi berbagai aturan perdagangan dan keuangan internasional seperti INCOTERMS, Arbitration and Arbitration Rules, Customs dan Uniform Documented Credit Procedures (UCP). Secara khusus, aturan UCP, misalnya, kini menjadi acuan hukum terpenting bagi

⁴ Istanul Badiri, "Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019," *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 2, no. 2 (2020): 147–57, <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070>.

⁵ Cahyo Sasmito, "Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Kaitannya Dengan Indonesia," 2020, 1–132.

⁶ Wiwin priana, "PERDAGANGAN INTERNASIONAL," *Buku Ajar*, 2023.

para trader saat melakukan transaksi internasional. Peraturan perbankan dan pembayaran UCP dihormati dan diikuti oleh pedagang terkemuka di seluruh dunia ⁷.

Perjalanan perkembangan kebijakan perdagangan Amerika Serikat dari periode pasca-Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, AS aktif terlibat dalam upaya mempromosikan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur dan bebas. Salah satu inisiatifnya adalah pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional (ITO).⁸Namun, upaya tersebut menghadapi kendala ketika Kongres Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi ITO. Penolakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran bahwa ITO terlalu liberal dan dapat mengurangi kewenangan nasional dalam mengatur perdagangan. Meskipun ITO gagal direalisasikan, AS tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya mendukung sistem perdagangan internasional. Sebagai alternatif, Amerika Serikat menyetujui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sebagai perjanjian perdagangan internasional sementara. GATT menjadi landasan bagi negosiasi perdagangan internasional dan membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam arah kebijakan perdagangan AS. Dengan demikian riset ini menelaah kerangka kerja untuk memahami perubahan dalam kebijakan perdagangan AS dari waktu ke waktu dan mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh negara ini dalam mengelola hubungan perdagangan internasionalnya. Studi tentang kebijakan perdagangan AS dapat menggali dampak dari keputusan-keputusan kunci seperti penolakan terhadap ITO dan adopsi GATT, serta bagaimana evolusi ini memengaruhi posisi dan strategi perdagangan AS dalam konteks global.

METODE PENELITIAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang diprakarsai oleh Donald Trump, diprakarsai berdasarkan masalah yang dihadapi Amerika Serikat. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat ketika mendeklarasikan kebijakan perang dagang adalah defisit ekonomi. Inilah awal dari kebijakan pemerintah Amerika dalam mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pandangan ini diperkuat oleh Macmillan dan Schumacher dalam *Studies in Education*, yang berpendapat bahwa analisis politik mengkaji kebijakan pemerintah untuk memberikan nasihat praktis kepada pembuat kebijakan. Politik adalah segala sesuatu

⁷ Evita Isretno Israhadi, "Hukum Dagang Internasional," 2016, 513.

⁸ Muhammad Naufal Abdurrasyid, "Analisis Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Era Barack Obama Terhadap Praktik Forced Labour Di Industri Periklanan Thailand 2009-2014," *Journal of International Relations*, 2 (2016): 135-44.

yang ingin dilakukan oleh pemerintah, dan merupakan kelanjutan dari usaha, tindakan, asumsi, dan keputusan rakyat yang menentukan kebijakan publik.

Perang dagang di era Donald Trump dan Ronald Reagan berawal dari satu masalah, yaitu defisit ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah AS memutuskan untuk memulai kembali perang dagang guna menstabilkan perekonomian AS. Dengan demikian, dari masalah yang sama diperoleh aturan yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Implementasi aturan tersebut dapat dijelaskan dengan metode penelitian. Menurut (Bofa 2021) tahapan penelitian kebijakan adalah identifikasi isu dan peluang kebijakan yang penting, perumusan masalah, pengembangan rencana implementasi kebijakan, dan terakhir analisis dan evaluasi.

Penelitian hukum sama halnya dengan penelitian bidang humaniora lainnya yang menggunakan tahapan, sehingga penelitian harus disusun sesuai dengan tahapan penelitian ilmiah (Ikhsanto 2020). Saat memeriksa aturan, kesalahan aturan yang dibuat juga akan terlihat.

Metode penelitian kebijakan ini akan digunakan sebagai argumen pendukung untuk menganalisis pembahasan teks perjanjian perdagangan Amerika dan China. Metode penelitian kebijakan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penting yang mendasari kebijakan ini diadopsi, dan analisis diskursif terhadap dokumen perjanjian perdagangan AS-Tiongkok dilakukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pengunjung rasa mengajukan pengaduan resmi di AS. Departemen Luar Negeri pada tahun 1929 sebagai tanggapan atas tagihan tarif yang diusulkan. Penerusnya adalah sekutu Amerika, yang dicantumkan oleh Mann (1930) dan sumber-sumber kontemporer lainnya sebagai pajak AS. ekspor dalam menanggapi Smoot Hawley.¹¹ Karena banyak pembalasan juga menentang pajak, kami juga mendefinisikan "ancaman" sebagai kategori pengunjung rasa non-pembalasan. Ancaman menyumbang 43% dari jumlah total ancaman di AS. perdagangan pada tahun 1928, sementara pengganti menyumbang 38% dari total AS. pembalasan dendam, mitra dagang menemukan cara lain untuk menanggapi konsesi Smoot-Hawley, termasuk kuota dan pengeboman AS. produk. Misalnya, Royal Italian Automobile Club memasang iklan di surat kabar menyerukan boikot mobil Amerika yang ditargetkan pada konsumen AS. produk sebagai

tidak patriotik⁹. Di Amerika Selatan, surat kabar utama *La Manana* mengusulkan boikot nasional atas barang-barang yang dibeli oleh konsumen Amerika kelas atas, seperti mobil, seperti yang dilakukan penyelenggara di Argentina.¹⁰ Federation of Rural Societies of Uruguay mendesak pemerintah untuk mengenakan pajak yang sangat tinggi terhadap mobil dan menganggapnya benar-benar dilarang di bawah program penanggulangan AS¹¹.

Demikian pula, beberapa cabang Kamar Dagang Swiss memperkenalkan resolusi yang menyerukan pemboikotan barang-barang Amerika seperti mesin tik dan mobil¹². Dan di Ceko, negara tersebut dapat dianeksasi oleh Amerika Serikat. ekspor mobil dalam menanggapi Smoot-Hawley¹³. Analisis data dan ekonometrik kami yang disajikan di bagian berikut memungkinkan kemungkinan bahwa tanggapan mitra dagang dapat mencakup hambatan non-tarif ini serta arah perdagangan AS yang besar. Artinya memperlakukan baik definisi pembalasan yang sempit, di mana "penjawab" hanya mencakup negara-negara yang tercantum memberlakukan tarif sebagai tanggapan atas keputusan Smoot-Hawley, dan definisi yang lebih luas tentang "kewajiban" yang mencakup "ancaman". Karena ketiga langkah tersebut diberi kode yang berbeda, mereka juga mempertimbangkan hambatan non-tarif (seperti kuota) serta keputusan yang mengecualikan pemain (misalnya, boikot). Dalam Bagian ini, kami juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa respons ditujukan untuk Amerika Serikat tertentu. sektor ekspor.¹⁴

Untuk lebih memahami sikap responden, kami mengkaji hubungan perdagangan dan politik antara negara-negara tersebut dan Amerika Serikat sebelum perang dagang. Model probit mencakup faktor ekonomi yang muncul dalam literatur saat ini tentang perang perdagangan atau yang dibahas dalam protes mitra dagang sebagai tanggapan atas

⁹ Dien Yudithadewi, Bonifasius Santiko Parikesit, and Eka Wenats Wuryanta, "Game of Thrones Sebagai Arsitektur Ekonomi Politik Global Versi Indonesia," *Jurnal Sosial Politik* 6, no. 2 (2020): 225–35, <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12015>.

¹⁰ Arsyad Sobby and Gesit Yudha, "The Actualization of Democracy Values Based on Local Wisdom," *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 57–69, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14032>.

¹¹ Meity Estetika, Azhar, and Gunawan Lestari Elake, "Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat," *Sriwijaya Journal of International Relations* 2, no. 2 (2022): 42–69, <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.51>.

¹² Ninin Khoirunnisa and Dyana Sari, "Bisnis Internasional Untuk," *Social Science Research Network*, 2020, 1–77.

¹³ Maya Indah Bofa, "Slavery in the Modern Era: Prison Labor in Global Economic and Trade Systems Perbudakan Di Era Modern: Prison Labor Dalam Sistem Ekonomi Dan Perdagangan Global" 26, no. 1 (2021): 2021.

¹⁴ Yudithadewi, Parikesit, and Wuryanta, "Game of Thrones Sebagai Arsitektur Ekonomi Politik Global Versi Indonesia."

keputusan AS untuk mengusulkan tarif pada tahun 1929; neraca perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat selama tiga tahun 1926–1928; total penjualan pemerintah dalam satu tahun (dibagi dengan total penjualan pemerintah); dan ekspor ke Amerika Serikat dan total ekspor pada tahun 1928.12. Model probit juga mencakup beberapa variabel ekonomi politik yang digunakan oleh sejarawan ekonomi untuk menentukan kebijakan perdagangan: budaya politik (politik) suatu negara, diukur pada skala dua puluh satu (angka yang lebih tinggi menunjukkan demokrasi, otoritarianisme berkurang); indeks yang menunjukkan apakah negara tersebut menandatangani perjanjian DPS dengan Amerika Serikat pada tahun 1928; dan indeks yang menunjukkan apakah suatu negara memiliki utang luar negeri sejak Perang Dunia I.

1. Konferensi internasional

Perjanjana adalah liburan musim panas internasional. Secara umum, hubungan internasional diselenggarakan dalam kerangka perkembangan multilateral, regional dan bilateral. Perbatasan dunia multietnis atau multietnis adalah perbatasan tujuh titik dan perbatasan antara dua pitak. Beberapa perjanjian internasional memiliki perjanjian yang mendefinisikan esensi perjanjian. Ini juga merupakan perjanjian internasional yang memberikan hak tertentu kepada organisasi internasional di bidang perdagangan dan keuangan. Pedagang internasional dalam semua jenis perjudian takut menemukan bahwa setaranga yang sempergat kualitas aktivitas tersembunyi.

2. Kebijakan Kebiasaan Internasional

Ini adalah level tertinggi organisasi internasional. Sejak awal, bergabung dengan organisasi hak asasi manusia internasional hanya untuk alasan lain, untuk memperkuat mata baik kerabat laki-lakinya. Dalam kajian hukum dagang internasional, konsep ini dapat dianggap sebagai hukum dagang atau hukum dagang (Navu dan Waksawisi). Jadi logika ini diperlukan untuk 'menciptakan' pabrik untuk mengirimkan transfer dari mereka di bawah manajer mereka. Modeling (lembaga hukum) adalah proses pertukaran dan transformasi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:

Para pihak (korporasi) dalam sengketa perdagangan internasional tidak lain adalah Dalam hukum dagang, ada beberapa pemangku kepentingan atau entitas. Paragraf internasional,

negara, perusahaan, individu, dll Para pihak yang bersengketa di sini terbatas pada pihak yang bertransaksi (perseorangan atau badan hukum). dan negara. Karena sifat hukum perdagangan internasional adalah transnasional, Diskusi terbatas. Mantan pedagang dan pedagang. Kedua, pedagang dan orang asing. Prosedur untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional Dalam kerangka WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), hal ini dapat dilakukan secara bertahap. Konsultasi, pembentukan panel, prosedur kelompok, penerimaan laporan kelompok DSB (acceptance) laporan panel), penanganan keluhan dan fase implementasi (eksekusi). Penyelesaian Sengketa - Dewan Penyelesaian Sengketa (Badan Penyelesaian Sengketa/DSB) yang berisi pedoman umum. (Dewan Umum/GG). DSB adalah satu-satunya otoritas yang kompeten Membentuk tim ahli untuk menyelidiki insiden tersebut. DSB bisa Itu juga dapat menerima atau menolak keputusan di tingkat banding atau keputusan Komisi. dll. memantau pelaksanaan kesimpulan dan rekomendasi; Badan/badan yang mengizinkan tindakan pembalasan jika terjadi pelanggaran oleh pemerintah Arbitrase dalam hal sengketa atau sengketa perdagangan internasional diperbolehkan antara para pihak sesuai dengan mekanisme dan prosedur Ini digunakan dalam WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan tidak membahayakan. salah satu pihak yang berkonflik.¹⁵

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Muhammad Naufal. “Analisis Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Era Barack Obama Terhadap Praktik Forced Labour Di Industri Periklanan Thailand 2009-2014.” *Journal of International Relations*, 2 (2016): 135–44.
- Badiri, Istanul. “Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok Periode 2018-2019.” *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 2, no. 2 (2020): 147–57.
<https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26070>.
- Bofa, Maya Indah. “Slavery in the Modern Era: Prison Labor in Global Economic and Trade Systems Perbudakan Di Era Modern: Prison Labor Dalam Sistem Ekonomi Dan Perdagangan Global” 26, no. 1 (2021): 2021.
- Evita Isretno Israhadi. “Hukum Dagang Internasional,” 2016, 513.
- Kamal, Ismail, and Muhammad Fuad. “Pengaruh Strategi Perang Dagang Donald Trump

¹⁵ Arriza Briella Kurniawardhani, “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto),” *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 49–53,
<https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>.

- Terhadap Hubungan Dagang Amerika Dan Tiongkok.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022).
- Khoirunnisa, Ninin, and Dyana Sari. “Bisnis Internasional Untuk.” *Social Science Research Network*, 2020, 1–77.
- Kurniawardhani, Arriza Briella. “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto).” *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 49–53. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>.
- Meity Estetika, Azhar, and Gunawan Lestari Elake. “Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat.” *Sriwijaya Journal of International Relations* 2, no. 2 (2022): 42–69. <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.51>.
- Mitchener, Kris James, Kevin Hjortshøj O Rourke, and Kirsten Wandschneider. “THE SMOOT-HAW LEY TRADE WAR *.” *The Economic Journal* 132, no. February (2022): 2500–2533.
- Sasmito, Cahyo. “Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Kaitannya Dengan Indonesia,” 2020, 1–132.
- Sobby, Arsyad, and Gesit Yudha. “The Actualization of Democracy Values Based on Local Wisdom.” *KnE Social Sciences* 2023 (2023): 57–69. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14032>.
- Soeparma, I. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Wiwin priana. “PERDAGANGAN INTERNASIONAL.” *Buku Ajar*, 2023.
- Yudithadewi, Dien, Bonifasius Santiko Parikesit, and Eka Wenats Wuryanta. “Game of Thrones Sebagai Arsitektur Ekonomi Politik Global Versi Indonesia.” *Jurnal Sosial Politik* 6, no. 2 (2020): 225–35. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12015>.